

## Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (1)\*

Meitha Tatik Soekotjo

\*Topik ini merupakan penelitian lanjutan dari tesis penulis.

### Abstrak

Komoditas pertanian Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung terwujudnya keberhasilan perdagangan tersebut. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU 9/2006) dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Sistem ini tidak hanya akan menitikberatkan pada mutu komoditas pertanian semata sebagai komoditas perdagangan, tetapi lebih pada peningkatan kemampuan produsen pertanian, khususnya para petani, yang berarti juga peningkatan kemampuan baik secara ekonomi maupun sosial. Pensosialisasian undang-undang tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat mengerti dan mendukung pelaksanaannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kemampuan bersaing komoditas pertanian Indonesia dalam perdagangan internasional dapat terwujud.

### Pendahuluan

Besarnya kebutuhan akan peraturan yang mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi dan perdagangan yang semakin global telah mendorong keinginan para pembuat undang-undang untuk merancang perundang-undangan yang berkenaan dengan kebutuhan tersebut. Salah satu undang-undang yang berusaha menjawab kebutuhan tersebut adalah UU 9/2006 yang menggunakan instrumen keuangan Resi Gudang. Sistem ini diyakini akan dapat menjadi instrumen yang mampu menggerakkan dan meningkatkan kelancaran proses produksi dan distribusi barang, khususnya komoditas pertanian, dalam perdagangan global atau bebas, karena system ini

memiliki manfaat-manfaat<sup>1</sup> sebagai berikut:

- a. Memobilisasi kredit ke sektor pertanian;
- b. Memperkecil fluktuasi harga;
- c. Memperbaiki sistem pengamanan pangan;
- d. Memperkuat daya tawar-menawar petani;
- e. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mutu komoditi yang baik bagi para pihak yang terkait dengan usaha komoditas pertanian;

<sup>1</sup> Pegawai Tetap Unpar Laboratorium Hukum Unpar

<sup>1</sup> BAPPEBTI, Lapoan Konferensi *Warehouse Receipts System (WRS)* atau Tanda Penerimaan Gudang (TPG), 9-11 Juli 2001 di Amsterdam, <http://www.bappebti.go.id/press/laporan003.asp>, tanggal akses: 7 April 2003

